

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS UPAH PEKERJA SISTEM SATUAN HASIL DI PERUSAHAAN PERKEBUNAN PT X

Oleh :

Indri Jasinta *, Murti Pramuwardhani Dewi **

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kerja dalam sistem alih daya terhadap praktik pengupahan pekerja harian dengan sistem satuan hasil di Perusahaan perkebunan PT X telah sesuai dengan ketentuan peraturan hukum ketenagakerjaan serta untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pelindungan hukum terhadap hak atas upah pekerja harian dengan system satuan hasil dengan sistem alih daya di Perusahaan perkebunana tebu PT X.

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis dan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian), serta data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui kuesioner dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan wawancara kepada responden yakni pekerja harian sistem satuan hasil, kepala alih daya, Kepala Divisi SDM PT X, dan narasumber yakni Dinas Ketenagakerjaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini dilakukan secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan skema alih daya PT X mengalami cacat hukum substantif dan formal. Secara substantif, pekerjaan penebangan tebu merupakan kegiatan utama (*core business*) yang dilarang dialihdayakan berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026. Secara formal, hubungan kerja hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis dengan alih daya. Status hubungan kerja tersebut demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) langsung dengan PT X. Akibatnya, hak atas upah pekerja tereduksi secara signifikan hingga hanya mencapai 20%–23% dari UMK. Praktik ini melanggar prinsip *Responsibility* dan *Fairness* dalam *Good Corporate Governance* (GCG) PT X melalui pengalihan risiko usaha secara sepihak. Rendahnya upah memicu deprivasi hak kesehatan dan pendidikan anak yang melanggengkan kemiskinan struktural dan kemiskinan antargenerasi. Ketiadaan serikat pekerja serta terhambatnya bipartit dan pengawasan daerah pada akhirnya memaksa pekerja menempuh aksi di luar hukum guna menuntut keadilan.

Kata kunci : Pelindungan hukum, hak atas upah, hubungan alih daya.

LEGAL PROTECTION OF THE RIGHT TO WAGES FOR PIECE-RATE WORKERS AT PT X PLANTATION COMPANY

Author:

Indri Jasinta*, Murti Pramuwardhani Dewi**

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze whether the employment relationship within the alih daya system regarding piece-rate wage practices for daily workers at sugarcane plantation company PT X complies with labor law regulations, as well as to analyze the legal protection implications for the right to wages of daily piece-rate workers under the alih daya system at sugarcane plantation company PT X.

This master's thesis research is descriptive-analytical and falls under the category of normative-empirical legal research. The approaches employed are the statutory approach and the conceptual approach. The data used consists of secondary data comprising primary legal materials (statutory regulations) and secondary legal materials (legal literature, journals, and research findings), as well as primary data obtained from field research through questionnaires using a purposive sampling method and interviews with respondents—namely daily piece-rate workers, heads of alih daya s, and the Head of the HR Division of PT X—and a key informant, namely the local Manpower Office. Data analysis in this thesis research was conducted qualitatively.

The results of the study indicate that PT X's outsourcing scheme suffers from substantive and formal legal defects. Substantively, sugarcane harvesting is a core business activity that is prohibited from being outsourced under Minister of Manpower Regulation No. 7 of 2026. Formally, the employment relationship is based solely on verbal agreements without a written contract with the alih daya. Consequently, the status of the employment relationship, by operation of law, converts into an Indefinite-Term Employment Contract (PKWTT) directly with PT X. As a result, workers' wage rights are significantly reduced, reaching only 20%–23% of the applicable Regency Minimum Wage (UMK). This practice violates the principles of Responsibility and Fairness in PT X's Good Corporate Governance (GCG) through unilateral business risk shifting. Low wages trigger the deprivation of children's rights to health and education, thereby perpetuating structural and intergenerational poverty. The absence of trade unions, coupled with obstructed bipartite dialogue and local oversight, ultimately forces workers to pursue extra-legal action to demand justice.

Keywords: *Legal protection, right to wages, outsourcing relationship.*